



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



RENJA 2022

RENCANA KERJA

PONTIANAK 2021
JL. AHMAD YANI KOMPLEK KANTOR GUBERNUR LT. 3
TELP. (0561) 736541 EXT. 122



DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
BAB I. PENDAHULUAN		1
1.1. Latar Belakang		1
1.2. Landasan Hukum.....		2
1.3. Maksud dan Tujuan		3
1.4. Sistematika Penulisan		4
BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah		5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....		9
2.3. Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....		10
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....		11
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat		18
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		19
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional		19
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah.....		20
3.3. Program dan Kegiatan.....		20
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...		21
BAB V. PENUTUP		26



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen RENJA yang disusun setiap tahunnya memuat evaluasi program, kegiatan dan pendanaan indikatif pada tahun sebelumnya serta rencana untuk tahun yang akan datang, baik program dan kegiatan rutin maupun strategis.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat.

Penyusunan RENJA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 ini adalah untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Oleh karena itu, dalam optimalisasi implementasinya diperlukan komitmen dan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan guna mencapai tujuan RENJA Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Selain itu juga, diharapkan dapat menjadi jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta optimalisasi partisipasi masyarakat dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada.

Berdasarkan landasan diatas, maka dengan optimalisasi sumber daya serta pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja yang baik dan tepat, diharapkan pelaksanaan RENJA yang dimiliki oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini dapat berhasil.



1.2. Landasan Hukum

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-D aerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 1.2.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.2.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.2.4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- 1.2.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 1.2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 1.2.8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 1.2.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2009



- tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 1.2.10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 1.2.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 1.2.12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 1.2.13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - 1.2.14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023;
 - 1.2.15. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 69).

1.3. Maksud dan Tujuan

- 1.3.1. Maksud dari penyusunan RENJA ini adalah agar dapat menjamin keterkaitan, keserasian dan harmonisasi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun 2022.



- 1.3.2. Tujuan penyusunan RENJA ini adalah untuk dijadikan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan tugas, fungsi tata kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam mendukung visi dan misi Sekretariat Daerah pada Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Pendahuluan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan
- 3.4. Tujuan dan Sasaran OPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Biro Pengadaan Barang dan Jasa terbentuk melalui penetapan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 beserta perubahannya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk Tahun 2020, Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan 7 Program dengan 31 Kegiatan didalamnya dimana pembiayaan yang dibutuhkan sekitar Rp.4.509.084.061,40.

Faktor-kator yang mempengaruhi pelaksanaan/pencapaian target kinerja program/kegiatan antara lain kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa maupun anggaran yang terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan tidak optimal. Namun, dengan komitmen yang tinggi dari tiap-tiap jajaran baik fungsional maupun struktural, seluruh program/kegiatan yang ada dapat terlaksana dengan baik.

Dari faktor-faktor di atas telah diantisipasi dengan pengusulan tambahan sumber daya manusia melalui penyusunan Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerja serta rasionalisasi anggaran masing-masing kegiatan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA sampai dengan Tahun 2020 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel halaman berikutnya.



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA PD dan Pencapaian RENSTRA PD s/d Tahun 2020
Provinsi Kalimantan Barat
SKPD : Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (RENJA PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d Tahun Berjalan	
					Target RENJA PD Tahun 2020	Realisasi RENJA PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6/7)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.01.5.01.01.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1 Unit	-	3 Unit	3 Unit	100,00%	1 Unit	1 Unit	100,00%
	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Izin Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit Roda Empat, 2 Unit Roda Dua	-	3 Unit	3 Unit	100,00%	2 Unit Roda Empat, 2 Unit Roda Dua	2 Unit Roda Empat, 2 Unit Roda Dua	100,00%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Jasa	70 Lembar Materai 3000, 165 Lembar materai 6000 dan Pulsa Bulanan	-	-	-	-	70 Lembar Materai 3000, 165 Lembar Materai 6000 dan Pulsa 12 Bulan	70 Lembar Materai 3000, 165 Lembar Materai 6000 dan Pulsa 12 Bulan	100,00%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Kantor	36 Jenis	-	-	-	-	36 Jenis	36 Jenis	100,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Rim Pamflet, 40 Buku, 4000 Lembar Penggandaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	2 Rim Pamflet, 40 Buku, 4000 Lembar Penggandaan	2 Rim Pamflet, 40 Buku, 4000 Lembar Penggandaan	100,00%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Pertemuan	400 Porsi	1 Laporan	150 Porsi	150 Porsi	100,00%	300 Porsi	300 Porsi	100,00%
	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	1 Tahun	-	-	-	-	2 jenis	2 jenis	100,00%
5.01.5.01.01.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA									
	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10-15 Jenis	1 Laporan (Dikelola oleh Biro Umum)	1 Laporan (Dikelola oleh Biro Pengelolaan Aset)	1 Laporan (Dikelola oleh Biro Pengelolaan Aset)	100,00%	3 Jenis	3 Jenis	100,00%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara	3 Unit Roda Empat; 2 Unit Roda Dua	-	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	2 Unit Roda empat, 2 Unit Roda Dua	2 Unit Roda empat, 2 Unit Roda Dua	100,00%



	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin Yang Terpelihara	20 Unit	-	34 Kali	34 Kali	100,00%	13 Unit	13 Unit	100,00%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor Ynag Terpelihara	3-5 Jenis	-	5 Unit	5 Unit	100,00%	15 Unit Komputer/Printer	15 Unit Komputer/Printer	100,00%
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Kegiatan	-	-	-	-	2 Jenis	2 Jenis	100,00%
5.01.5.01.01.11.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR									100,00%
	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai	60 Orang	-	-	-	-	60 Orang	60 Orang	100,00%
5.01.5.01.01.11.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARTUR									100,00%
	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK Yang Dinilai	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Dokumen PAK	1 Dokumen PAK	100,00%
	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan	1 Laporan	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja	1 Dokumen	1 Laporan/dokumen	1 Laporan/dokumen	1 Laporan/dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
5.01.5.01.01.11.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan Keuangan	5 Laporan	5 Laporan/Dokumen	5 Laporan/Dokumen	5 Laporan/Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	1 Laporan/dokumen	1 Laporan/dokumen	1 Laporan/dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	2 Laporan/dokumen	2 Laporan/dokumen	2 Laporan/dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen	2 Laporan/dokumen	2 Laporan/dokumen	2 Laporan/dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Ketersediaan Data, Informasi, dan Dokumentasi	1 Laporan	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
5.01.5.01.01.11.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH									100,00%
	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	-	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
5.01.5.01.01.11.16	PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA									100,00%
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/Jasa	1 Dokumen Laporan	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
	Pengelolaan Sistem Informasi dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa	Sistem Informasi dan Infrastruktur Pendukung Pengadaan barang/jasa Ynag Dikelola	1 Dokumen Laporan	-	-	-	-	6 Sistem Informasi	6 Sistem Informasi	100,00%
	Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya strategi, Pemetaan, dan Perumusan Kebijakan Pengadaan Untuk Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen Laporan	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
	Pengelolaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan pengelolaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen Laporan	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%



Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Laporan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan petunjuk Penggunaan	1 Dokumen Laporan	-	-	-	-	1 Dokumen, 1000 Brosur dan 500 Buku	1 Dokumen, 1000 Brosur dan 500 Buku	100,00%
Pengelolaan Layanan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Laporan Pengelolaan Layanan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	1 Dokumen Laporan	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pengadaan barang/Jasa	1 Dokumen Laporan	-	-	-	-	2 Jenis Pembinaan	2 Jenis Pembinaan	100,00%
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen Laporan	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
Pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen Laporan	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
Pengembangan Sistem Insentif Personil UKPBJ	Tersedianya Insentif Personil UKPBJ	1 Dokumen Laporan	-	-	-	-	37 Orang	37 Orang	100,00%



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai unit kerja yang baru terbentuk pada Tahun 2020, Biro Pengadaan Barang dan Jasa baru menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada tahun berjalan melalui Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023.

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 berjumlah 10 (sepuluh) kegiatan strategis dan ditunjang 21 (dua puluh satu) kegiatan rutin dengan total pagu anggaran keseluruhan berjumlah Rp.4.509.084.061,40

Pelaksanaan evaluasi kinerja Tahun 2020 dilakukan terhadap capaian kinerja organisasi dengan menganalisis pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis dalam rangka mencapai sasaran startegis dan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian kinerja organisasi dapat dilihat dari analisa pada tiap-tiap sasaran strategis. Adapun capaian kinerja sasaran strategis pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa seperti yang tertuang pada table 2.2 sebagai berikut.



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Provinsi Kalimantan Barat

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Proses Pengadaan Memenuhi Prinsip - Prinsip Pengadaan Barang/Jasa	-	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	Jumlah pemilihan penyedia yang dilakukan dibagi dengan jumlah usulan paket pengadaan barang/jasa



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa tidak terlepas dari pelayanan terhadap perangkat daerah maupun masyarakat luas. Bidang urusan yang dilaksanakan yaitu urusan pengadaan barang/jasa.

Dalam rangka mewujudkan urusan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang profesional, terbuka dan kredibel, dapat dilaporkan bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun 2020 melaksanakan prosesnya tender sebanyak 267 paket pengadaan barang dan jasa.

Dari hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, tentunya terdapat **hambatan dan permasalahan** yang dihadapi, yaitu masih terbatasnya kapasitas SDM pada OPD terkait yang berdampak kepada mekanisme pengusulan paket tender yang lama serta tidak siap untuk ditender karena adanya kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi.

Selanjutnya RUP yang harus di entry oleh masing-masing OPD pada setiap akhir tahun anggaran (berdampak pagu indikatif tahun anggaran yang akan datang) masih belum sesuai dengan apa yang direncanakan dan metode pengadaan, sehingga berdampak pula pada pelaksanaan pengadaan di tahun berikutnya.

Permasalahan tersebut diatas masih dapat ditangani sehingga dampak terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur tidak berdampak secara langsung. Hal tersebut juga didasarkan bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa merupakan Perangkat Daerah yang bersifat administratif sehingga dampak yang dirasakan tidak dapat terlihat secara langsung.

Dari hambatan dan permasalahan yang dihadapi, upaya **pemecahan atau solusi** guna mengantisipasi hambatan dan kendala diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan diseminasi dan literasi kepada OPD baik secara administrasi dengan penegasan melalui Surat Gubernur maupun rapat pimpinan dalam rangka mekanisme dan ketentuan



pengusulan tender paket pengadaan barang dan jasa setelah anggaran disahkan oleh Kepala Daerah dan DPRD.

- 2) Mewujudkan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang berbasis web/teknologi informasi guna efektivitas dan transparansi dalam mekanisme proses pemilihan penyedia barang/jasa maupun dokumen dapat menjadi lebih baik dan akuntabel.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam penyusunan RENJA ini tidak terlepas dari dokumen RKPD yang telah diusulkan sebelumnya, Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam rancangan RENJA ini seluruhnya telah sesuai serta mengikuti program/kegiatan yang telah diusulkan dalam dokumen RKPD sebelumnya. Semua kebutuhan untuk pelaksanaan RENJA 2022 telah ditampung semuanya dalam RKPD, Oleh karena itu, tidak dijelaskan lebih dalam mengenai perubahan rancangan program dan kegiatan baik penambahan maupun penghapusan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 2.3 berikut.



Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Provinsi Kalimantan Barat
Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		Persentase Capaian Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	80%	1.000.000.000	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		Persentase Capaian Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	80%	1.000.000.000	Sesuai
			Persentase Capaian Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	7%	750.000.000			Persentase Capaian Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	7%	750.000.000	Sesuai
			Persentase penggunaan SPSE	85%	1.741.000.000			Persentase penggunaan SPSE	85%	1.741.000.000	Sesuai
			Persentase UKPBJ di Kalimantan Barat yang memenuhi level kematangan minimal 3 (Pro Aktif)	33%	8.300.000.000			Persentase UKPBJ di Kalimantan Barat yang memenuhi level kematangan minimal 3 (Pro Aktif)	33%	8.300.000.000	Sesuai
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu	60%	1.750.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu	60%	1.750.000.000	Sesuai
1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pontianak	Jumlah inventarisasi paket pengadaan barang/jasa	5 DOKUMEN	300.000.000	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pontianak	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	5 DOKUMEN	300.000.000	Sesuai
			Jumlah Rumusan Strategi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	2 DOKUMEN	200.000.000			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 DOKUMEN	200.000.000	Sesuai
2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pontianak	Jumlah Paket Dalam Rangka Pemilihan	300 TENDER	550.000.000	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pontianak	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 TENDER	550.000.000	Sesuai



			Jumlah Produk Katalog Lokal Yang Ditayangkan	2 PRODUK	200.000.000			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 PRODUK	200.000.000	Sesuai
3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Melalui Tender dan Non Tender	12 DOKUMEN	300.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Melalui Tender dan Non Tender	12 DOKUMEN	300.000.000	Sesuai
			Persentase Capaian RUP ke Dalam SIRUP	98%	200.000.000			Persentase Capaian RUP ke Dalam SIRUP	98%	200.000.000	Sesuai
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Realisasi Pengadaan Barang/Jasa	8000 Paket	1.741.000.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Realisasi Pengadaan Barang/Jasa	8000 Paket	1.741.000.000	Sesuai
1	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Kota Pontianak	Jumlah Penanganan Gangguan SPSE Yang Dapat Ditangani	120 LAPORAN	416.000.000	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Kota Pontianak	Jumlah Penanganan Gangguan SPSE Yang Dapat Ditangani	120 LAPORAN	416.000.000	Sesuai
2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Kegiatan	Jumlah Aplikasi Pendukung LPSE\ Yang Dikelola	9 APLIKASI	920.000.000	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Kegiatan	Jumlah Aplikasi Pendukung LPSE\ Yang Dikelola	9 APLIKASI	920.000.000	Sesuai
3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pontianak	Jumlah Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dipublikasi	24.000 INFORMASI	405.000.000	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pontianak	Jumlah Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dipublikasi	24.000 INFORMASI	405.000.000	Sesuai
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah UKPBJ yang dilakukan Pembinaan	14 UKPBJ	7.300.000.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah UKPBJ yang dilakukan Pembinaan	14 UKPBJ	7.300.000.000	Sesuai
			Jumlah Kompetensi SDM PBJ dan Pelaku Usaha yang dilakukan Pembinaan	965 ORANG	1.000.000.000			Jumlah Kompetensi SDM PBJ dan Pelaku Usaha yang dilakukan Pembinaan	965 ORANG	1.000.000.000	Sesuai
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pontianak	Jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengikuti pengembangan kompetensi	24 ORANG	400.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pontianak	Jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengikuti pengembangan kompetensi	24 ORANG	400.000.000	Sesuai
2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pontianak	Jumlah UKPBJ yang mencapai tingkat kematangan minimal level 3 (Pro Aktif)	2 UKPBJ	7.300.000.000	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pontianak	Jumlah UKPBJ yang mencapai tingkat kematangan minimal level 3 (Pro Aktif)	2 UKPBJ	7.300.000.000	Sesuai
3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan	941 ORANG	600.000.000	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pelaku Usaha yang mengikuti	941 ORANG	600.000.000	Sesuai



			Pelaku Usaha yang mengikuti Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis					Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis			
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Tugas Sesuai Standar			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Tugas Sesuai Standar			Sesuai
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Keuangan Tepat waktu, % Laporan Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	100%	111.500.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Keuangan Tepat waktu, % Laporan Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	100%	111.500.000	Sesuai
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja	1 Dokumen	26.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja	1 Dokumen	26.500.000	Sesuai
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000	Sesuai
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000	Sesuai
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	12.000.000	Sesuai
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen DPPA SKPD	1 Dokumen	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen DPPA SKPD	1 Dokumen	12.000.000	Sesuai
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Kinerja	2 Dokumen	24.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Kinerja	2 Dokumen	24.000.000	Sesuai
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	13.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	13.000.000	Sesuai



2	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan, % pemenuhan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan	100%	46.000.000	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan, % pemenuhan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan	100%	46.000.000	Sesuai
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun Tepat Waktu	1 Laporan	9.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun Tepat Waktu	1 Laporan	9.500.000	Sesuai
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat waktu	4 Laporan	36.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat waktu	4 Laporan	36.500.000	Sesuai
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	24.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	24.500.000	Sesuai
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan	24.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan	24.500.000	Sesuai
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		% Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sesuai Prosedur, % ASN Yang Mengisi Data ASN, % ASN Yang Menyusun dan Melaporkan Kinerja Tepat Waktu, % Pengembangan Kompetensi Pegawai Sesuai Dengan Perencanaan	100%	37.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		% Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sesuai Prosedur, % ASN Yang Mengisi Data ASN, % ASN Yang Menyusun dan Melaporkan Kinerja Tepat Waktu, % Pengembangan Kompetensi Pegawai Sesuai Dengan Perencanaan	100%	37.500.000	Sesuai
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pontianak	Jumlah DUPAK Yang Dinilai dan Jumlah Analisis Jabatan	2 Laporan	37.500.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pontianak	Jumlah DUPAK Yang Dinilai dan Jumlah Analisis Jabatan	2 Laporan	37.500.000	Sesuai
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Barang, % Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Dikelola Dengan Baik, % Tertib Pengelolaan Arsip	100%	375.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Barang, % Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Dikelola Dengan Baik, % Tertib Pengelolaan Arsip	100%	375.000.000	Sesuai
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29 Jenis	30.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29 Jenis	30.500.000	Sesuai



2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	3 Jenis	16.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	3 Jenis	16.500.000	Sesuai
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70 Orang	55.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70 Orang	55.000.000	Sesuai
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah Penyediaan Barang Cetak, Jumlah Penyediaan Bahan Penggandaan	3 Jenis	11.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah Penyediaan Barang Cetak, Jumlah Penyediaan Bahan Penggandaan	3 Jenis	11.500.000	Sesuai
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	1 Dokumen	181.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	1 Dokumen	181.000.000	Sesuai
6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Sistem Yang Dikelola	1 Sistem	80.500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Sistem Yang Dikelola	1 Sistem	80.500.000	Sesuai
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas (Kumulatif Tahun Berjalan)	100%	627.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas (Kumulatif Tahun Berjalan)	100%	627.500.000	Sesuai
1	Pengadaan Mebel	Kota Pontianak	Jumlah Pengadaan Mebelair	7 Jenis	64.500.000	Pengadaan Mebel	Kota Pontianak	Jumlah Pengadaan Mebelair	7 Jenis	64.500.000	Sesuai
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 Jenis	563.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 Jenis	563.000.000	Sesuai
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah	100%	76.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah	100%	76.500.000	Sesuai
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kota Pontianak	Jumlah Bulan Pelayanan	12 Bulan	76.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kota Pontianak	Jumlah Bulan Pelayanan	12 Bulan	76.500.000	Sesuai



8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% BMD Dalam Kondisi Baik	100%	596.600.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% BMD Dalam Kondisi Baik	100%	596.600.000	Sesuai
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	72.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	72.500.000	Sesuai
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	4 Unit	123.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	4 Unit	123.500.000	Sesuai
3	Pemeliharaan Mebel	Kota Pontianak	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	24 Unit	22.600.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Pontianak	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	24 Unit	22.600.000	Sesuai
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	5 Jenis	177.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	5 Jenis	177.000.000	Sesuai
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Gedung Yang Dipelihara dan Direhabilitasi	2 Unit	201.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Gedung Yang Dipelihara dan Direhabilitasi	2 Unit	201.000.000	Sesuai
TOTAL					13.686.100.000,00	TOTAL					13.686.100.000,00



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Biro Pengadaan Barang dan Jasa merupakan unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan salah satu unit kerja administratif yang bertugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan bidang pengadaan barang/jasa. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tugas dan fungsi hanya bersifat administratif baik dalam bentuk fasilitasi, monitoring dan evaluasi maupun perumusan kebijakan, sehingga dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan tidak secara langsung menampung usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun perangkat daerah lainnya.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam undang-undang tersebut terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- 1) Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- 4) Optimalisasi partisipasi masyarakat; dan
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam pembangunan yang bersinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka perlu penyelarasan Arah kebijakan antara Kementerian/Lembaga terkait dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya berkaitan dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Melalui Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri periode 2015-2019 telah dijabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang mana salah satunya sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa yaitu penyelarasan dengan arah kebijakan nasional dilakukan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dengan peningkatan keadilan, transparansi dan profesionalisme pengadaan barang/jasa pemerintah.



Tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah memastikan bahwa arah kebijakan dan strategi pembangunan pada Kementerian/Lembaga terkait berjalan dengan baik dan saling mendukung guna keselarasan pembangunan dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa, tujuan yang ingin dicapai yaitu terwujudnya tata kelola pengadaan barang dan jasa yang berkualitas.

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai yaitu meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dan diperlukan pembiayaan pada Tahun 2022 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut terdiri dari 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan, yang dibiayai oleh dana APBD Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 13.686.100.000,00.

Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 serta prakiraan maju Tahun 2023 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat seperti yang tersaji pada tabel 3.1 berikut ini.



Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PENUNJANG				13.686.100.000,00				16.020.600.000,00
	PENGADAAN BARANG DAN JASA				13.686.100.000,00				16.020.600.000,00
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA				13.686.100.000,00				16.020.600.000,00
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA				13.686.100.000,00				16.020.600.000,00
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Capaian Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kota Pontianak	80%	1.000.000.000	DAU		85%	1.200.000.000
		Persentase Capaian Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kota Pontianak	7%	750.000.000	DAU		7%	900.000.000
		Persentase penggunaan SPSE	Kota Pontianak	85%	1.741.000.000	DAU		95%	2.440.000.000
		Persentase UKPBJ di Kalimantan Barat yang memenuhi level kematangan minimal 3 (Pro Aktif)	Kota Pontianak	33%	8.300.000.000	DAU		53%	9.400.000.000
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu	Kota Pontianak	60%	1.750.000.000	DAU		70%	2.100.000.000
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah inventarisasi paket pengadaan barang/jasa	Kota Kegiatan	5 DOKUMEN	300.000.000	DAU		5 DOKUMEN	350.000.000
		Jumlah Rumusan Strategi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Kota Pontianak	2 DOKUMEN	200.000.000	DAU		2 DOKUMEN	250.000.000



Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Dalam Rangka Pemilihan	Kota Pontianak	300 TENDER	550.000.000	DAU		300 TENDER	700.000.000
	Jumlah Produk Katalog Lokal Yang Ditayangkan	Kota Pontianak	2 PRODUK	200.000.000	DAU		2 PRODUK	200.000.000
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Melalui Tender dan Non Tender	Dalam dan Luar Daerah	12 DOKUMEN	300.000.000	DAU		12 DOKUMEN	350.000.000
	Persentase Capaian RUP ke Dalam SIRUP	Kota Pontianak	98%	200.000.000	DAU		100%	250.000.000
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Realisasi Pengadaan Barang/Jasa	Kota Pontianak	8000 Paket	1.741.000.000	DAU		10.000 Paket	2.440.000.000
Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Penanganan Gangguan SPSE Yang Dapat Ditangani	Kota Pontianak	120 LAPORAN	416.000.000	DAU		150 LAPORAN	780.000.000
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Aplikasi Pendukung LPSE\ Yang Dikelola	Kota Pontianak	9 APLIKASI	920.000.000	DAU		9 APLIKASI	1.050.000.000
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dipublikasi	Kota Pontianak	24.000 INFORMASI	405.000.000	DAU		25.000 INFORMASI	610.000.000
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah UKPBJ yang dilakukan Pembinaan	Kota Pontianak	14 UKPBJ	7.300.000.000	DAU		14 UKPBJ	8.000.000.000
	Jumlah Kompetensi SDM PBJ dan Pelaku Usaha yang dilakukan Pembinaan	Kota Pontianak	965 ORANG	1.000.000.000	DAU		1014 ORANG	1.400.000.000
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengikuti pengembangan kompetensi	Kota Pontianak	24 ORANG	400.000.000	DAU		53 ORANG	600.000.000
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah UKPBJ yang mencapai tingkat kematangan minimal level 3 (Pro Aktif)	Kota Pontianak	2 UKPBJ	7.300.000.000	DAU		3 UKPBJ	8.000.000.000
Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pelaku Usaha yang mengikuti Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis	Kota Pontianak	941 ORANG	600.000.000	DAU		961 ORANG	800.000.000



PROGRAM URUSAN DAERAH PROVINSI	PENUNJANG PEMERINTAHAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Tugas Sesuai Standar	Kota Pontianak			DAU			132.267.740,00
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Keuangan Tepat waktu, % Laporan Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	Kota Pontianak	100%	111.500.000	DAU		100%	122.500.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja	Kota Pontianak	1 Dokumen	26.500.000	DAU		1 Dokumen	28.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	1 Dokumen	12.000.000	DAU		1 Dokumen	13.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	1 Dokumen	12.000.000	DAU		1 Dokumen	13.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	Kota Pontianak	1 Dokumen	12.000.000	DAU		1 Dokumen	13.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPPA SKPD	Kota Pontianak	1 Dokumen	12.000.000	DAU		1 Dokumen	14.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Kinerja	Kota Pontianak	2 Dokumen	24.000.000	DAU		2 Dokumen	26.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	2 Dokumen	13.000.000	DAU		2 Dokumen	15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan, % pemenuhan Tindakanjuit Hasil Pemeriksaan	Kota Pontianak	100%	46.000.000			100%	50.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun Tepat Waktu	Kota Pontianak	1 Laporan	9.500.000	DAU		1 Laporan	10.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat waktu	Kota Pontianak	4 Laporan	36.500.000	DAU		4 Laporan	40.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pontianak	100%	24.500.000	DAU		100%	26.500.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kota Pontanok	1 Laporan	24.500.000	DAU		1 Laporan	26.500.000



	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sesuai Prosedur, % ASN Yang Mengisi Data ASN, % ASN Yang Menyusun dan Melaporkan Kinerja Tepat Waktu, % Pengembangan Kompetensi Pegawai Sesuai Dengan Perencanaan	Kota Pontianak	100%	37.500.000	DAU		100%	40.000.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah DUPAK Yang Dinilai dan Jumlah Analisis Jabatan	Kota Pontianak	2 Laporan	37.500.000	DAU		2 Laporan	40.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Barang, % Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Dikelola Dengan Baik, % Tertib Pengelolaan Arsip	Kota Pontianak	100%	375.000.000	DAU		100%	412.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	29 Jenis	30.500.000	DAU		29 Jenis	33.500.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Kota Pontianak	3 Jenis	16.500.000	DAU		3 Jenis	18.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	70 Orang	55.000.000	DAU		70 Orang	60.500.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak, Jumlah Penyediaan Bahan Penggandaan	Kota Pontianak	3 Jenis	11.500.000	DAU		3 Jenis	12.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Kota Pontianak	1 Dokumen	181.000.000	DAU		1 Dokumen	199.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Yang Dikelola	Kota Pontianak	1 Sistem	80.500.000	DAU		1 Sistem	88.500.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas (Komulatif Tahun Berjalan)	Kota Pontianak	100%	627.500.000			100%	689.800.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebelair	Kota Pontianak	7 Jenis	64.500.000	DAU		7 Jenis	70.500.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	18 Jenis	563.000.000	DAU		18 Jenis	619.300.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	100%	76.500.000			100%	84.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Bulan Pelayanan	Kota Pontianak	12 Bulan	76.500.000	DAU		12 Bulan	84.000.000



	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD Dalam Kondisi Baik	Kota Pontianak	100%	596.600.000	DAU		100%	655.300.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak	1 Unit	72.500.000	DAU		1 Unit	79.500.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kota Pontianak	4 Unit	123.500.000	DAU		4 Unit	135.500.000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	Kota Pontianak	24 Unit	22.600.000	DAU		24 Unit	24.800.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	Kota Pontianak	5 Jenis	177.000.000	DAU		5 Jenis	194.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Yang Dipelihara dan Direhabilitasi	Kota Pontianak	2 Unit	201.000.000	DAU		2 Unit	221.000.000



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 adalah turunan dari Rencana Strategis dan sudah mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 tertuang pada tabel 4.1 berikut ini.



Tabel 4.1
Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2022
Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PENUNJANG				13.686.100.000,00		
	PENGADAAN BARANG DAN JASA				13.686.100.000,00		
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA				13.686.100.000,00		
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA				13.686.100.000,00		
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Capaian Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kota Pontianak	80%	1.000.000.000	DAU	
		Persentase Capaian Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kota Pontianak	7%	750.000.000	DAU	
		Persentase penggunaan SPSE	Kota Pontianak	85%	1.741.000.000	DAU	
		Persentase UKPBJ di Kalimantan Barat yang memenuhi level kematangan minimal 3 (Pro Aktif)	Kota Pontianak	33%	8.300.000.000	DAU	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu	Kota Pontianak	60%	1.750.000.000	DAU	



	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah inventarisasi paket pengadaan barang/jasa	Kota Kegiatan	5 DOKUMEN	300.000.000	DAU	
		Jumlah Rumusan Strategi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Kota Pontianak	2 DOKUMEN	200.000.000	DAU	
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Dalam Rangka Pemilihan	Kota Pontianak	300 TENDER	550.000.000	DAU	
		Jumlah Produk Katalog Lokal Yang Ditayangkan	Kota Pontianak	2 PRODUK	200.000.000	DAU	
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Melalui Tender dan Non Tender	Dalam dan Luar Daerah	12 DOKUMEN	300.000.000	DAU	
		Persentase Capaian RUP ke Dalam SIRUP	Kota Pontianak	98%	200.000.000	DAU	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Realisasi Pengadaan Barang/Jasa	Kota Pontianak	8000 Paket	1.741.000.000	DAU	
	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Penanganan Gangguan SPSE Yang Dapat Ditangani	Kota Pontianak	120 LAPORAN	416.000.000	DAU	
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Aplikasi Pendukung LPSE \ Yang Dikelola	Kota Pontianak	9 APLIKASI	920.000.000		
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dipublikasi	Kota Pontianak	24.000 INFORMASI	405.000.000		
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah UKPBJ yang dilakukan Pembinaan	Kota Pontianak	14 UKPBJ	7.300.000.000	DAU	
		Jumlah Kompetensi SDM PBJ dan Pelaku Usaha yang dilakukan Pembinaan	Kota Pontianak	965 ORANG	1.000.000.000	DAU	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengikuti pengembangan kompetensi	Kota Pontianak	24 ORANG	400.000.000	DAU	
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah UKPBJ yang mencapai tingkat kematangan minimal level 3 (Pro Aktif)	Kota Pontianak	2 UKPBJ	7.300.000.000	DAU	
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pelaku Usaha yang mengikuti	Kota Pontianak	941 ORANG	600.000.000	DAU	



		Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Tugas Sesuai Standar	Kota Pontianak			DAU	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Keuangan Tepat waktu, % Laporan Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	Kota Pontianak	100%	111.500.000	DAU	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja	Kota Pontianak	1 Dokumen	26.500.000	DAU	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	1 Dokumen	12.000.000	DAU	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	1 Dokumen	12.000.000	DAU	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Kota Pontianak	1 Dokumen	12.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA SKPD	Kota Pontianak	1 Dokumen	12.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja	Kota Pontianak	2 Dokumen	24.000.000	DAU	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	2 Dokumen	13.000.000		
	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan, % pemenuhan Tindakanjuit Hasil Pemeriksaan	Kota Pontianak	100%	46.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun Tepat Waktu	Kota Pontianak	1 Laporan	9.500.000	DAU	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat waktu	Kota Pontianak	4 Laporan	36.500.000	DAU	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pontianak	100%	24.500.000	DAU	



	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kota Pontianak	1 Laporan	24.500.000	DAU	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sesuai Prosedur, % ASN Yang Mengisi Data ASN, % ASN Yang Menyusun dan Melaporkan Kinerja Tepat Waktu, % Pengembangan Kompetensi Pegawai Sesuai Dengan Perencanaan	Kota Pontianak	100%	37.500.000		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah DUPAK Yang Dinilai dan Jumlah Analisis Jabatan	Kota Pontianak	2 Laporan	37.500.000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Barang, % Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Dikelola Dengan Baik, % Tertib Pengelolaan Arsip	Kota Pontianak	100%	375.000.000	DAU	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	29 Jenis	30.500.000	DAU	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Kota Pontianak	3 Jenis	16.500.000	DAU	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	70 Orang	55.000.000	DAU	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak, Jumlah Penyediaan Bahan Penggandaan	Kota Pontianak	3 Jenis	11.500.000	DAU	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Kota Pontianak	1 Dokumen	181.000.000	DAU	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Yang Dikelola	Kota Pontianak	1 Sistem	80.500.000	DAU	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas (Kumulatif Tahun Berjalan)	Kota Pontianak	100%	627.500.000		



	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebelair	Kota Pontianak	7 Jenis	64.500.000		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	18 Jenis	563.000.000	DAU	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	100%	76.500.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Bulan Pelayanan	Kota Pontianak	12 Bulan	76.500.000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD Dalam Kondisi Baik	Kota Pontianak	100%	596.600.000	DAU	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak	1 Unit	72.500.000	DAU	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kota Pontianak	4 Unit	123.500.000	DAU	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	Kota Pontianak	24 Unit	22.600.000	DAU	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	Kota Pontianak	5 Jenis	177.000.000	DAU	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Yang Dipelihara dan Direhabilitasi	Kota Pontianak	2 Unit	201.000.000	DAU	

BAB V**PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 merupakan hasil penjabaran lebih lanjut dari Prakiraan Strategis (RENSTRA) dan Prakiraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat (RPJMD) tahun 2019-2023 yang disusun berdasarkan pendekatan yang bersifat strategis dan terfokus pada kebijakan untuk dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun 2022.

Demikian RENJA ini dibuat dengan penuh harapan dapat dilaksanakan secara terencana dan terukur.

Pontianak,

2021



KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA,


Drs. RAMINUDDIN, M.Si

Pembina Tingkat 1

NIP. 19770830 199603 1 001